



Diah Indriani

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Definisi

Sistem :

Sekumpulan komponen yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan

Sistem Informasi :

Sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi fakta (data)



Definisi

Sistem Informasi Kesehatan

Sekumpulan komponen yang bekerja sama menghasilkan informasi (fakta/data) untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan

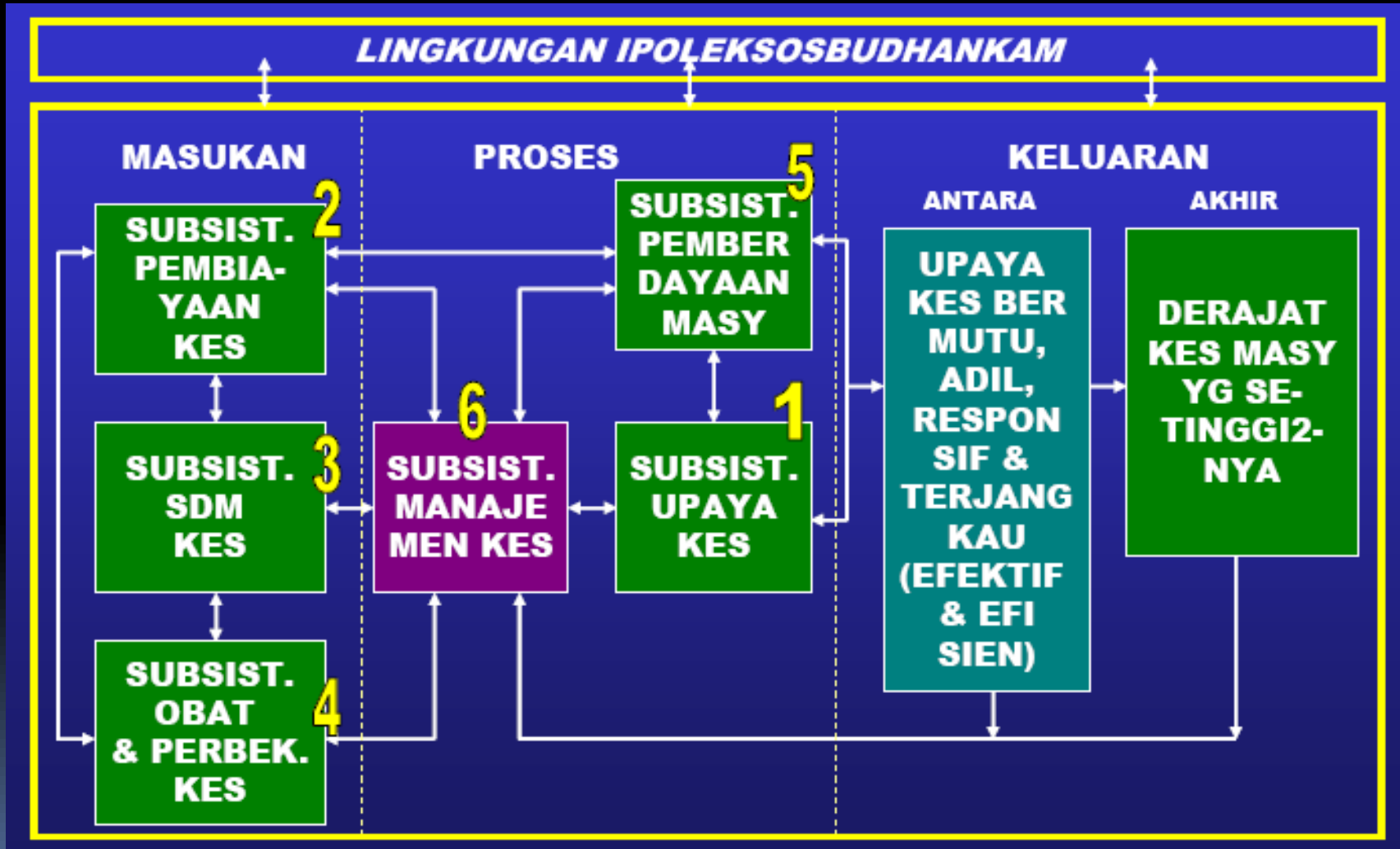
Tujuan :

- ❖ Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan
- ❖ Mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat
- ❖ Sebagai dasar evidence based bagi sistem kesehatan
- ❖ Sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan

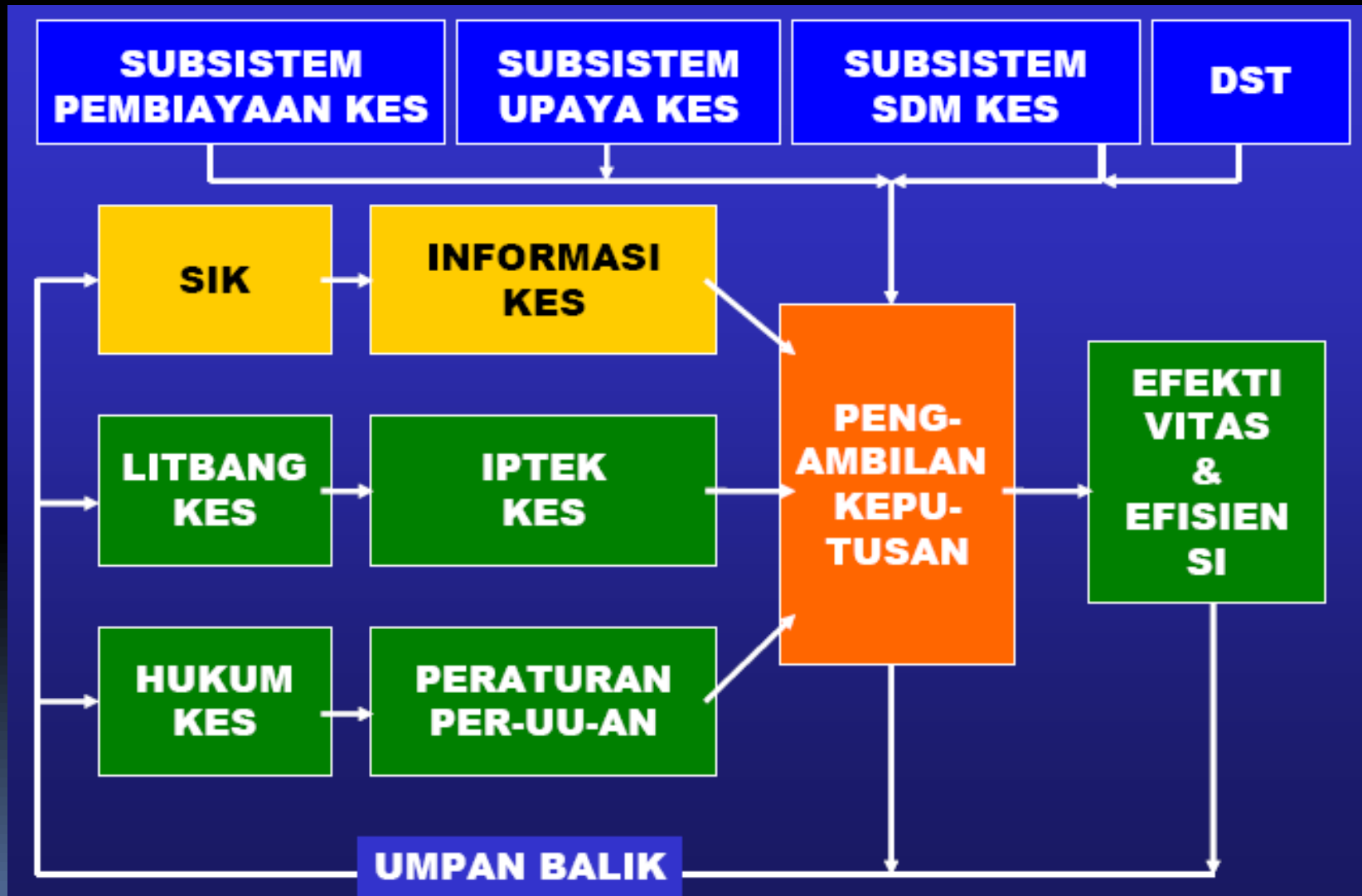
Dalam visi misi Departemen Kesehatan

- Meningkatkan surveilans, monitoring dan sistem informasi kesehatan
- Berfungsinya evidence based dalam seluruh sistem informasi kesehatan di Indonesia
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

Sistem Kesehatan dan Subsistem Pendukung



SIK dalam Manajemen Kesehatan



SIK dalam Manajemen Kesehatan

1. Manajemen Pasien/Klien

- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA *PASIE*N/KLIEN HARUS DILAYANI/DITANGANI**
- **PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: SETIAP PETUGAS KESEHATAN**

2. Manajemen Unit Kesehatan

- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA *SUMBER DAYA KES* (SDM, OBAT & PERBEKALAN KES, DLL) DI *UNIT KES* YBS HARUS DIDAYAGUNAKAN**
- **PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PIMPINAN UNIT KESEHATAN (KEPALA PUSKESMAS, DIREKTUR RS, DLL)**

3. Manajemen Sistem Kesehatan

- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG BAGAIMANA *SUMBER DAYA KES* (UNIT2 KES & SUMBER DAYA KES LAIN) DI *WILAYAH* YBS HARUS DIATUR/DIARAHKAN**
- **PENGAMBIL KEPUTUSANNYA: PENANGGUNG JAWAB KES WILAYAH YBS (KEPALA DINAS KES & STAKEHOLDERS)**

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SIKNAS DLM TATANAN OTONOMI DAERAH



SIKNAS = SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL

SIKDA = SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

**SIKDA-SIKDA KAB/KOTA ADALAH SUBSISTEM DARI SIKDA PROVINSI
SIKDA-SIKDA PROVINSI ADALAH SUBSISTEM DARI SIKNAS**



HARUS ADA KERJASAMA ANTAR-TINGKAT ADMINISTRASI

KEPMENKES NO. 511 TH 2002 STRATEGI PENGEMBANGAN SIKNAS DI ERA OTONOMI DAERAH



KEPMENKES NO. 837 TAHUN 2007

**DEPARTEMEN KESEHATAN
STRATEGI UTAMA KE-3
SASARAN KE-14**

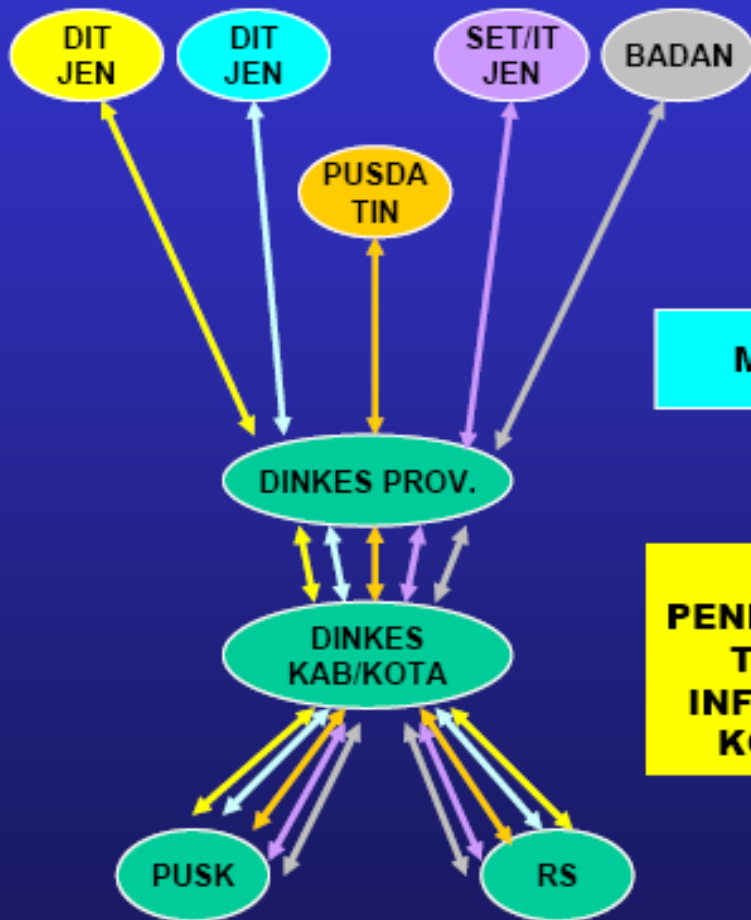
**BERFUNGSIONYA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
YANG EVIDENCE BASED
DI SELURUH INDONESIA**

**KOORDINATOR
PUSAT DATA & INFORMASI DEPKES**



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SIKNAS ONLINE

YG LAMA KOMUNIKASI DATA TERFRAGMENTASI



MENUJU

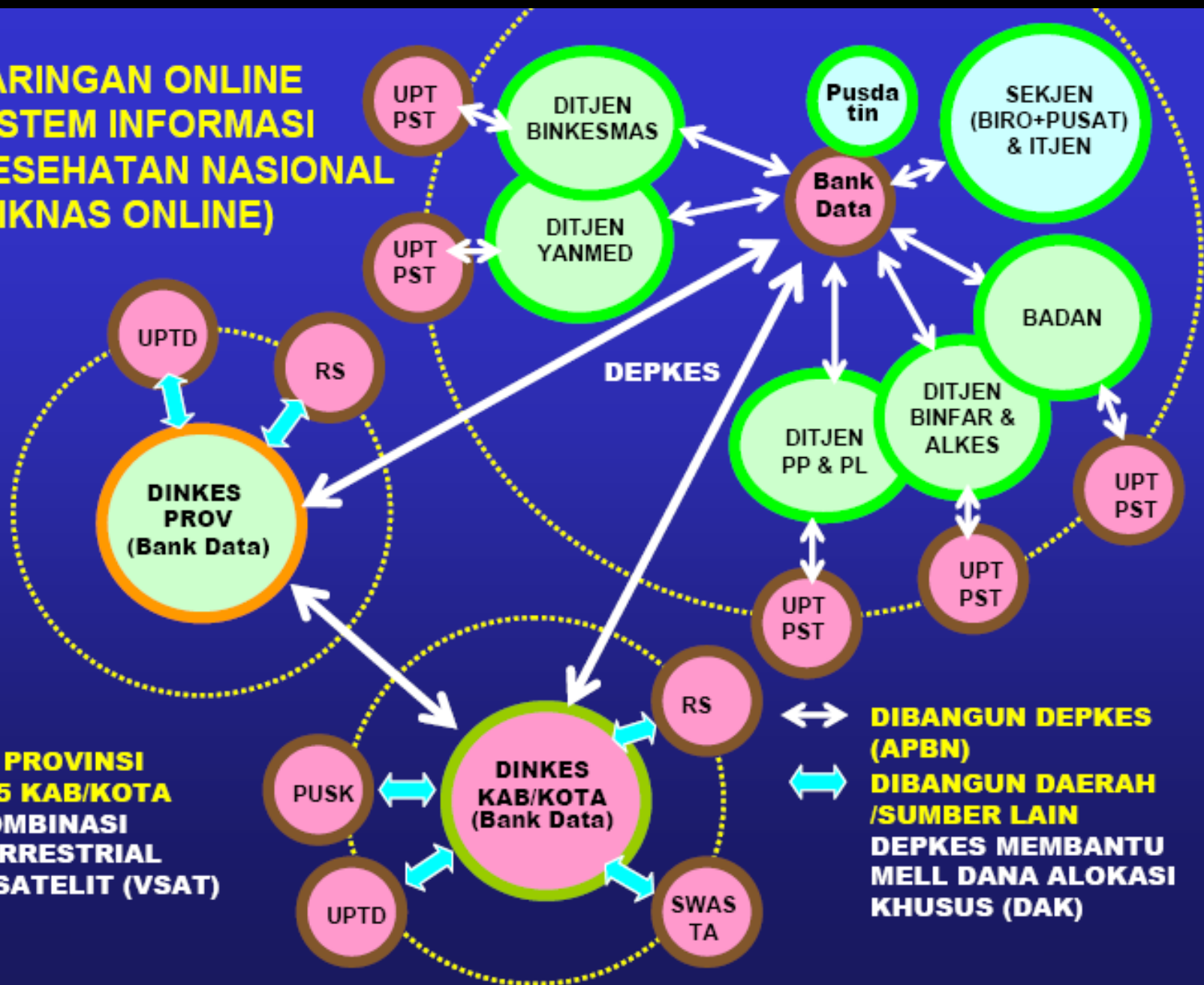
**MELALUI
PENDAYAGUNAAN
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

YG AKAN DICIPTAKAN KOMUNIKASI DATA TERINTEGRASI*)



*) DG MENGHILANGKAN
"OVERLAPS" &
MENGAKOMODASI
DLM SATU JALUR

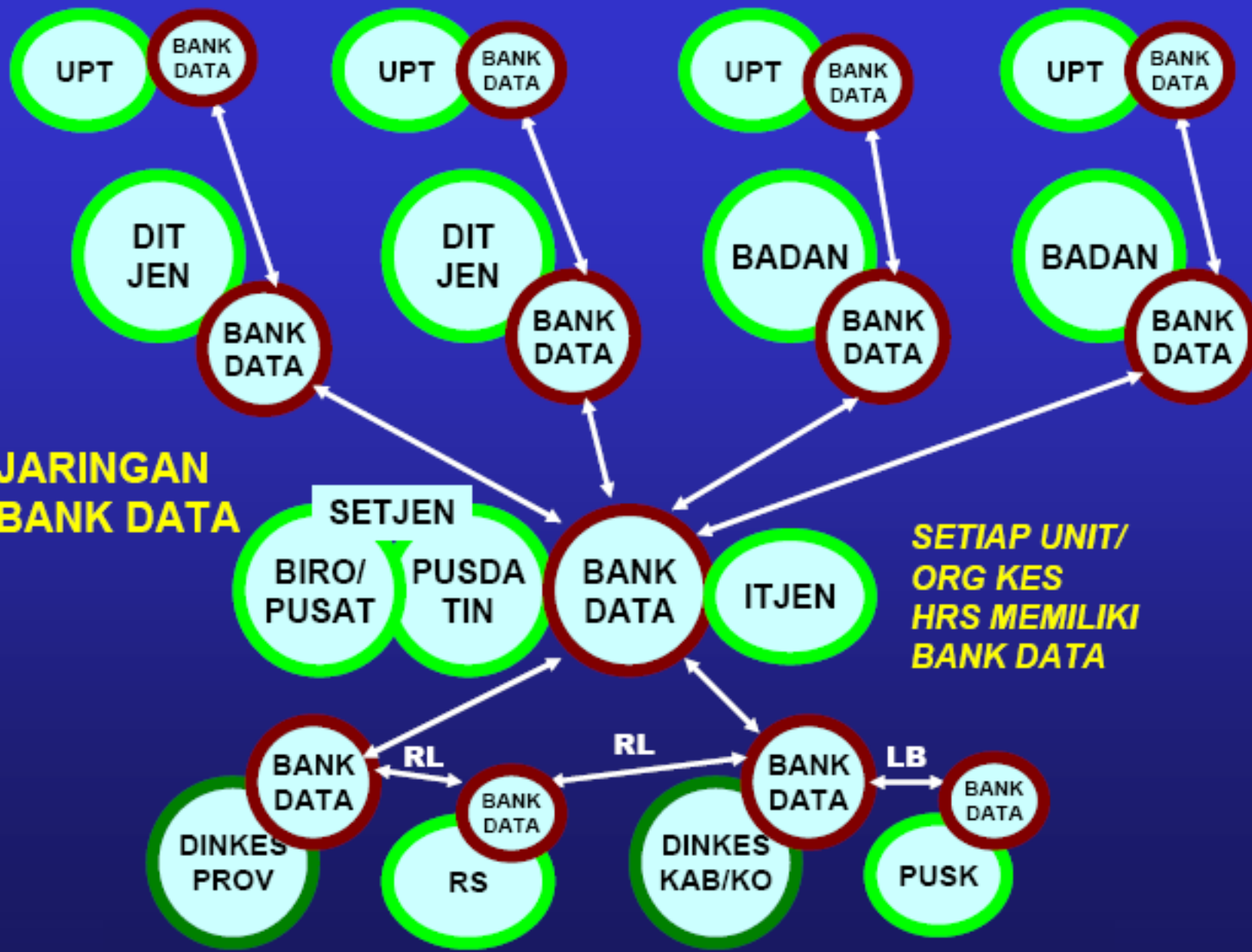
JARINGAN ONLINE SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS ONLINE)



**33 PROVINSI
355 KAB/KOTA
KOMBINASI
TERRESTRIAL
& SATELIT (VSAT)**

**DIBANGUN DEPKES (APBN)
DIBANGUN DAERAH /SUMBER LAIN
DEPKES MEMBANTU MELL DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

JARINGAN BANK DATA



SETIAP UNIT/
ORG KES
HRS MEMILIKI
BANK DATA

Pemanfaatan SIKNAS Online

- Komunikasi Data Terintegrasi (sudah dimulai tahun 2007), yaitu arus tukar-menukar data antar unit kesehatan (khususnya antara Daerah dan Pusat), yang mencakup semua data esensial yang diperlukan untuk manajemen kesehatan (data kegiatan puskesmas, kegiatan rumah sakit, kegiatan sarana kesehatan lain, termasuk data keuangannya, tenaga kesehatannya, obatnya, perbekalan farmasinya, dan sumber daya lainnya), data perkembangan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, dan data perkembangan pelaksanaan Desa Siaga.
- Informasi Eksekutif (sudah dimulai tahun 2007), yaitu sarana tukar-menukar informasi antar pimpinan kesehatan (Pusat dan Daerah) dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, secara cepat dan tepat.
- Telekomunikasi & Teleconference (sudah dimulai tahun 2007), yaitu pemanfaatan jaringan komputer online untuk komunikasi suara (Voice over Internet Protocol-VoIP) dan rapat jarak jauh antar pejabat Pusat, dan antara Pejabat-pejabat Pusat dengan Pejabat-pejabat Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Pemanfaatan SIKNAS Online

- Distance Learning (akan dimulai tahun 2008), yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jarak jauh, khususnya untuk petugas-petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain).
- Digital Library Service (akan dimulai tahun 2008), yaitu pengembangan kerjasama antar unit perpustakaan dan dokumentasi di bidang kesehatan (intranet dan internet) untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik yang berupa literature/hasil-hasil penelitian maupun media promosi kesehatan.
- Telemedicine (akan dimulai tahun 2009), yaitu pengembangan rujukan dan diagnosis serta terapi jarak jauh, dan aplikasi-aplikasi lain di bidang kedokteran.
- Web based Networking (akan dimulai tahun 2009), yaitu pengembangan jaringan situs di internet dan pemanfaatan jaringan tersebut untuk berbagai keperluan seperti lelang melalui internet.

Kedudukan Puskesmas, Dinkes dalam SIK

Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan Kabupaten

- Kedudukan dalam bidang administrasi :
 - Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kedudukan dalam jenjang sistem rujukan pelayanan kesehatan:
 - Pada urutan tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan, Puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama.

Kedudukan Puskesmas, Dinkes dalam SIK

Kedudukan dalam sistem kesehatan secara nasional

Puskesmas berkedudukan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan nasional.

Kedudukan dalam sistem pembangunan nasional

Puskesmas berkedudukan sebagai salah satu unsur pembangunan dalam bidang kesehatan yang terdepan dan yang pada dasarnya saling tergantung satu dengan lainnya dengan unsur pembangunan sektor terkait di tingkat kecamatan.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP₂TP) yang berlaku hingga saat ini adalah merujuk pada Keputuasan Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/INFO/V/96 (Departemen Kesehatan RI, 1998).

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Ada 2 jenis pencatatan kegiatan Puskesmas, yaitu :

- Pencatatan di dalam gedung Puskesmas
Pencatatan di dalam gedung Puskesmas membutuhkan Kartu Tanda Pengenal Keluarga (KTPK), Kartu Status Perorangan dan beberapa Buku Register.
- Pencatatan di luar gedung Puskesmas
Pencatatan di luar gedung Puskesmas menggunakan beberapa Buku Register.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

1. Laporan harian untuk melaporkan kejadian luar biasa penyakit tertentu.
2. Laporan mingguan untuk melaporkan kegiatan penyakit yang sedang ditanggulangi
3. Laporan bulanan untuk melaporkan kegiatan rutin program.

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Bulanan

- Formulir LB 1 untuk data kesakitan
- Formulir LB 2 untuk Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
- Formulir LB 3 untuk data Gizi, KIA, Imunisasi dan Pengamatan Penyakit Menular
- Formulir LB 4 untuk data kegiatan Puskesmas

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Tahunan

- Formulir LT-1 untuk data dasar Puskesmas
- Formulir LT-2 untuk data kepegawaian Puskesmas termasuk Bidan di desa
- Formulir LT-3 untuk data peralatan Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Laporan Puskesmas Sentinel

- Puskesmas-puskesmas yang telah ditetapkan untuk pemantauan program tertentu selain mengirimkan laporan seperti yang telah disebutkan diatas, juga mengirimkan laporan sentinel seperti :
- LB₁S untuk data penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD₃I) dan Penyakit Diare,
- LB₂S untuk data KIA, Gizi, ISPA dan Penyakit Akibat Kerja

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas)

Laporan khusus yang tidak termasuk dalam SP₂TP

- SP₂TP tidak mencakup data Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah serta laporan Keluarga Berencana (KB).
- KLB dan Wabah dilaporkan tersendiri sesuai dengan SK Dirjen PPM & PLP No. 451-I/PD.03.04.IS/1991 tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB.
- Laporan Keluarga Berencana ditetapkan bersama oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Kepala BKKBN.

SPRS (Sistem Pelaporan Rumah Sakit)

- 1 RL1 Data Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit
- 2 RL2a Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Inap
- 3 RL2b Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Jalan
- 4 RL2a1 Data Keadaan Morbiditas Rawat Inap Surveilans Terpadu RS
- 5 RL2b1 Data Keadaan Morbiditas Rawat Jalan Surveilans Terpadu RS
- 6 RL2c Data Status Imunisasi
- 7 RL2.1, Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Umum
RL2.2, Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Obstetri
RL2.3 Data Individual Morbiditas Pasien Rawat Inap Perinatal
- 8 RL3 Data Dasar Rumah Sakit
- 9 RL4 Data Keadaan Ketenagaan Rumah Sakit
- 10 RL4a Data Individual Ketenagaan RL4a
- 11 RL5 Data peralatan Medik Rumah Sakit
- 12 RL6 Data Infeksi Nosokomial Rumah Sakit